

RESESI EKONOMI BISNIS DI DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

BUSINESS ECONOMIC RECESSION IN THE WORLD ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW

Qorry Ulfah Lasia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Jl. Kapten Muchtar Basri, No. 3 Medan
Qorryulfah@umsu.ac.id

Naskah diterima: 31 April 2025

Revisi: 3 Mei 2025

Disetujui: 10 Mei 2025

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena resesi dan depresi yang terjadi di Indonesia. Resesi ekonomi terjadi ditandai dengan pelemahan ekonomi global, menurunnya marginal efficiency of capital, tingginya angka pengangguran, turunnya ekspor dan investasi serta penurunan penerimaan negara dari pajak serta diturunkannya target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah seperti resesi. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah resesi menjadi depresi adalah menerbitkan berbagai kebijakan memberi kemudahan administrasi (ijin) dan pajak bagi pemilik modal (investor) untuk berinvestasi, membangun berbagai proyek dengan mengeluarkan anggaran secara massive. Jika terjadi depresi, diperlukan autonomous dan induced investment yang akan menciptakan dorongan kuat bagi bangkitnya perekonomian dari keterpurukan. Berbagai resesi dunia dan macam-macam melahirkan problematika berkepanjangan multi sector termasuk sector ekonomi yang kemudian mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi dan implikasinya. Kondisi demikian tentu diharapkan tidak terjadi dalam waktu lama, harapan semua pihak termasuk pemerintah supaya resesi segera normal pulih dengan mengupayakan berbagai langkah dan pendekatan seperti pendekatan hukum bisnis. Tulisan ini fokus pada kajian bagaimana memotret resesi ekonomi dan implikasinya perspektif hukum bisnis sebagai alternatif pemulihan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara menelusuri teks kepustakaan yang terkait resesi ekonomi yang fokus dengan pendekatan hukum bisnis. Temuan penelitian adalah bahwa dalam perspektif hukum bisnis, hukum mampu memberikan solusi prosedural (procedural capability) dalam menyelesaikan resesi ekonomi. Hukum dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif

pembangunan ekonomi. Hukum juga berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan definisi dan status yang jelas mengenai akibat interaksi sosial serta mengakomodasi (accommodation) keseimbangan secara jelas bagi kepentingan individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Kata Kunci : Resesi Dunia ; Ekonomi; Implikasi; Hukum; Hukum Bisnis

ABSTRACT

This paper aims to explore the phenomenon of recession and depression that occurred in Indonesia. Economic recession occurs characterized by a weakening of the global economy, a decline in marginal efficiency of capital, a high unemployment rate, a decline in exports and investment, as well as a decrease in state revenue from taxes and a reduction in economic growth targets by the government, which seems like a recession. Policies that the government can do to prevent a recession from becoming a depression are to issue various policies to provide administrative facilities (permits) and taxes for capital owners (investors) to invest, build various projects by spending massive budgets. In the event of a depression, autonomous and induced investment is needed which will create a strong impetus for the rise of the economy from the downturn. Various world recessions and droughts have given birth to prolonged problems in multi-sectors, including the economic sector, which then results in an economic recession and its implications. Such a condition is certainly expected not to occur for a long time, it is hoped that all parties, including the government, will soon recover to normal by pursuing various steps and approaches such as business law approaches. This paper focuses on the study of how to photograph an economic recession and its implications from a business law perspective as an alternative to economic recovery. This research is a literature research by tracing literature texts related to economic recession that focus on business law approaches. The findings of the study are that from the perspective of business law, law is able to provide procedural solutions (procedural capability) in resolving economic recessions. Law can play a role in creating balance, because it is related to economic development initiatives. Law also plays a role in determining the definition and clarity of status. In the end, the law must also be able to provide a clear definition and status regarding the consequences of social interaction and accommodate a clear balance for the interests of individuals or groups in society.

Keywords: World Recession; Economics; Implication; Law; Business Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Resesi adalah kemerosotan ekonomi yang tidak hanya disebabkan dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Perkembangan teknologi turut menjadi faktor adanya resesi. Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan lapangan pekerjaan yang banyak digantikan oleh teknologi terkemuka seperti Artificial Intelligence (AI) dan robot. Resesi ekonomi sebagai entitas ancaman menurut (Hairunnisa 2020) menjelaskan bahwa dari potensi ancaman ekonomi dapat terjadi karena dua factor, baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal memberikan peluang terhadap ancaman ekonomi seperti dampak perang dagang maupun sanksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara atau korporasi melalui pembatasan perdagangan, tarif atau embargo ekonomi. Resesi ekonomi juga menjadi ancaman ekonomi yang dapat memberikan dampak ekonomi seperti krisis maupun resesi ekonomi pada negara terdampak dengan sanksi bagi Negara tertentu (Adhari 2020). Terkait sanksi

ekonomi, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) mengatur bahwa perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara melarang adanya pemberian sanksi ekonomi pada negara lain, namun terdapat pengecualian jika hal tersebut dilakukan atas nama keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal XXI GATT (Korah 2016).¹

Saat ini banyak negara memperbincangkan kemungkinan terjadi resesi dan depresi di negaranya masing masing. Indonesia termasuk diantaranya. Sinyal dari terjadinya resesi dan depresi terlihat dari mulai melemahnya aktifitas ekonomi sektor riil di negara itu. Terjadinya resesi dan depresi adalah fenomena biasa dalam suatu perekonomian jangka panjang yang perekonomiannya terus tumbuh. Ia merupakan fenomena konjungtur jangka panjang yang pasti terjadi. Dalam konjungtur jangka panjang terlihat trend ekonomi terus tumbuh ditengah resesi dan depresi yang terjadi. Tak ada yang perlu dipermasalahkan jika pemerintah dan masyarakat bijak meresponnya. Kehadiran resesi dan depresi tak

¹ *EQUILIBRIUM*, Volume 9, Nomor 1,

2021

dapat dicegah terkecuali meringankan dampak yang mungkin terjadi. Kala perekonomian terus tumbuh dalam jangka panjang ditemukakan marginal efficiency of capital - sebut saja penghasilan dari sebuah investasi - yang menurun yang mengurangi hasrat pemilik modal enggan berinvestasi dan mengalihkannya ke sektor keuangan sebagai sumber alternatif mendapatkan penghasilan dari bunga atau saham. Hal inipun merupakan yang lumrah yang dilakukan oleh pemilik modal (investor).

Tindakan ini disebut tindakan rasional yang dilakukan oleh investor bagi menghindari dari kerugian ataupun untuk mendapatkan penghasilan pengganti. Inilah fenomena yang terjadi saat ini. Hal tersebut terlihat dari semakin berkembangnya pasar uang (bursa efek) diseluruh negara dimana pemilik uang bisa mendapatkan penghasilan dari selisih perubahan nilai (harga) saham dalam jangka pendek. Ini pula yang menyebabkan modal terus berpindah dari satu negara ke negara lain ke negara yang

memberikan suku bunga tinggi. Kala nilai saham pada suatu negara (bursa) melemah tapi saham tersebut memiliki prospek maka pemilik uang membelanjakan uangnya pada pembelian saham dan menjualnya seketika saat nilai saham itu naik kembali.²

Transaksi jual beli saham dijadikan media oleh pemilik uang untuk mendapatkan penghasilan. Saham dibeli bukan untuk dimiliki selamanya tapi untuk dijual kembali kala nilainya naik. Saham dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli di pasar uang. Masuk dan keluarnya modal asing dan domestik dari lantai bursa merupakan hal yang lumrah. Ini terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan yang setiap saat terus berubah. Demikian juga dengan obligasi yang bersuku bunga tinggi yang mampu menarik modal asing dan domestik. Jika dulu modal sebagai media investasi riil semata saat ini bertambah sebagai transaksi kegiatan di sektor keuangan.³

Bahkan ada pula dimana uang dijadikan komoditi dalam

² Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung*, hlm. 5

³ Ibid., baca juga Starke, J.G., 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 9-10.

perdagangan mata uang asing. Kemajuan ekonomi banyak memberi perubahan dalam aktifitas perekonomian. Pertanyaannya mengapa marginal efficiency of capital menurun dalam jangka panjang. Jawabnya antara lain karena produksi barang (aggregate supply) yang semakin melimpah yang menyebabkan persaingan dalam menjual semakin ketat sehingga harga semakin bersaing dan cenderung menurun. Hal ini ditambah pula oleh kemajuan teknologi yang mendorong terus naiknya produksi sehingga pasar kebanjiran barang. Awalnya pemilik uang gemar berinvestasi (sektor riil) karena bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan dari bunga kalau modalnya di pinjamkan melalui perbankan (deposito). Nyatanya setelah melalui masa panjang penghasilan dari investasi mulai menurun karena membanjirnya produksi dan semakin ketatnya persaingan sehingga pemilik modal berpindah ke pasar keuangan.

Kalau hasrat berinvestasi ini semakin menurun maka pemutusan

hubungan kerja tidak dapat dihindari. Akibatnya sangat dalam dimana jumlah penganggur terus bertambah dan penghasilan masyarakat terus berkurang. Ini menyebabkan daya beli semakin melemah. Melemahnya daya beli menekan pengusaha menurunkan produksinya dan pemutusan hubungan kerjapun berlanjut. Aktifitas ekonomi semakin menciut. Ini yang dinamakan dengan resesi. Apakah Indonesia sudah memasuki masa resesi. Jawabannya terserah. Tapi melihat telah terjadinya pemutusan hubungan kerja pada beberapa perusahaan, turunnya ekspor dan investasi serta penurunan penerimaan negara dari pajak serta diturunkannya target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah sepertinya resesi sudah berjalan di Indonesia. Resesi diawali dari pelemahan ekonomi global yang memengaruhi perekonomian dalam negeri negara negara di dunia.⁴⁴

Semakin kuat ketergantungan ekonomi satu negara pada perekonomian global maka semakin cepat pula terjadinya resesi di negara itu. Sebab itu negara berkembang yang perekonomiannya bergantung

⁴ Jeremy Bentham adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah International

Law.

pada ekspor barang tambang, bahan baku dan pembantu akan lebih cepat merasakan suasana resesi. Pengaruh pelemahan ekonomi global terhadap munculnya resesi diantara negara-negara di dunia tidak sama. Diantara banyak negara yang gaduh dengan resesi tapi ada pula negara yang belum memperdulikannya. Pemerintah Indonesia pasti mengaminkan hal ini. Mengapa. Ekspor hasil tambang dan hasil sumberdaya alam Indonesia seperti batubara kelapa sawit, karet dan bahan mentah lainnya turun. Ekonomi negara importir sedang mengalami pelemahan sehingga permintaannya menurun. Banyak negara yang mengkhawatirkan resesi negaranya berlanjut kepada depresi. Sebab itu negara menerbitkan berbagai kebijakan memberi kemudahan administrasi (ijin) dan pajak bagi pemilik modal (investor) untuk berinvestasi. Kawasan industri dibangun dimana mana bagi memudahkan pemilik modal berinvestasi.

Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur. Tujuannya tak lain agar perekonomian tetap hidup dan masyarakat bisa mendapatkan

penghasilan sehingga daya beli tetap terjaga. Itu sebabnya negara selalu memantau besarnya pengeluaran rumah tangga sebagai sinyal daya beli masih bisa dipertahankan. Seperti yang terjadi besarnya pengeluaran rumah tangga Indonesia sekitar lima puluh lima persen dari total pengeluaran nasional. Pengeluaran rumah tangga sebagai pendukung pergerakan ekonomi Indonesia saat ini. Negara2rapun terus membangun berbagai proyek dengan mengeluarkan anggaran secara jorjoran disamping memberi kemudahan pada pihak swasta berinvestasi.

Tujuannya tak lain agar transaksi ekonomi dalam negeri tidak mati. Kesempatan kerja dapat diselamatkan, penghasilan dapat dipertahankan dan daya beli tetap terjaga. Mempertahankan ini tidak mudah dikala pertumbuhan ekonomi melambat (resesi). Ini tidak ubahnya seperti mendayung sampan dari hilir menuju hulu. Cukup berat dan memerlukan upaya all out. Walau ekonomi terus bergerak namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat karena pelemahan ekonomi global belum merangsang tumbuhnya perekonomian dalam

negeri. Pelemahan ekonomi global menjadikan permintaan global atas barang yang dihasilkan didalam negeri melemah.

Dengan demikian upaya mempertahankan aktifitas ekonomi dalam negeri terus dilakukan menanti sampai pelemahan ekonomi global berakhir dimana perekonomian secara perlahan berjalan normal. Perekonomian dalam negeri dan global kembali berjalan seperti sebelum terjadinya resesi. Masalahnya bagaimana jika upaya mempertahankan aktifitas ekonomi dalam negeri tidak berhasil. Inilah yang dikhawatirkan oleh banyak negara karena perekonomiannya berpotensi jatuh ke jurang depresi. Dalam keadaan depresi pemutusan hubungan kerja lebih parah lagi karena aktifitas ekonomi hampir terhenti. Terhenti sama sekali juga tidak karena kebutuhan manusia tidak pernah lenyap. Kebutuhan membikin manusia terus beraktifitas walau dalam skala mikro.^{5 5}

Depresi ditandai jika produk domestik bruto tumbuh negatif dalam kurun waktu dua kuartal berturut

turut (kesepakatan ilmuwan). Dapat dibayangkan apa yang terjadi dari tumbuhnya produk domestik bruto negatif. Produktifitas ekonomi betul betul jatuh yang berarti performance ekonomi sangat jelek. Kapasitas ekonomi berjalan dibawah potensi ekonomi yang ada. Sumber daya manusia dan sumber daya alam mati tak bergerak sehingga dapat dikatakan ekonomi dalam keadaan bangkrut. Ini adalah dampak terburuk yang ditakuti dari depresi. Namun karena kebutuhan manusia tidak pernah lenyap maka dampak buruk ini hanya sampai menekan derajat kehidupan terendah. Negara dengan kekuatannya dapat membangkitkan kembali perekonomian dengan berbagai kebijakan yang diterbitkan. Sebab itu negara tidak boleh lengah dan terus mencari solusi mengatasi masalah. Indonesia dengan tingkat pertumbuhan lima persen saat ini diprediksi sangat jauh dilanda depresi sepanjang negara concern meresponnya.

Bangkitnya kembali perekonomian dari depresi biasanya timbul dari inovasi yang muncul pengaruh kemajuan teknologi atau

⁵ Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika,

Jakarta., hlm 16-17.

manusia yang kreatif atau dunia usaha yang berprestasi tinggi dan memiliki branding ternama. Inovasi mampu menciptakan barang baru dan menciptakan investasi mandiri (autonomous investment). Investasi mandiri adalah investasi yang benar benar muncul dari adanya inovasi dari kemajuan teknologi bukan karena dimulai oleh adanya permintaan. Tak semua pula negara atau pribadi dapat menciptakan inovasi karena inovasi memerlukan pengetahuan dan pengalaman. Sebab itu walaupun masyarakat tidak memiliki kemampuan menciptakan inovasi disarankan setidaknya mampu berkreasi menciptakan berbagai barang yang mengundang datangnya permintaan. Kreatifitas juga dapat menciptakan investasi yang disebut dengan investasi ikutan (induced investment) yang muncul karena permintaan. Ini bisa terjadi jika inovasi dan kreatifitas itu dikaitkan dengan kebutuhan pasar.

Proses berjalannya autonomous dan induced investment akan menciptakan dorongan kuat bagi bangkitnya perekonomian dari keterpurukan. Kedua investasi berfungsi saling mendukung (leverage effect) yang mendorong

kebangkitan ekonomi. Proses jalannya multiplier effect dan accelerator menciptakan tumbuhnya badan badan usaha baru dan terciptanya lapangan kerja baru serta naiknya pendapatan masyarakat dan daya beli. Situasi ini terus berproses sehingga secara nasional ekonomi bangkit kembali. Sebab itu pemerintah terus mengajak dan mendorong pihak swasta dan masyarakat berinovasi dan berkreasi. Ajakan ini memerlukan modal dan kesungguhan masyarakat membuka lapangan usaha. Sosialisasi pentingnya dunia usaha bagi menggerakkan perekonomian terus dijalankan melalui penyuluhan dan penyaluran kredit yang berbunga rendah. Sebab itu dunia pendidikan tinggi juga harus ikut dalam gerakan ini dengan memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana pentingnya posisi dunia usaha dalam perekonomian. Jiwa pengusaha yang sering disebut dengan entrepreneurship bukan suatu ilmu.

Entrepreneurship merupakan sikap dan perbuatan nyata dari apa yang dilakukan oleh seorang pengusaha sukses. Sikap dan perbuatan inilah yang perlu

diturunkan kepada generasi penerus termasuk mahasiswa. Meneliti sikap dan keberhasilan seorang pengusaha perlu dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dibawah pimpinan seorang dosen bagi mendapatkan kunci keberhasilannya. Sinyal ini sebenarnya sudah terlihat dari penambahan nama fakultas dengan kata bisnis. Sayangnya kebijakan ini berjalan kurang efektif karena tidak terlihat adanya penelitian bidang bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun dosen setelah nama fakultas bertambah bisnis. Wajah penelitian dan skripsi masih merupakan wajah lama yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan menggerakkan perekonomian dan dunia usaha. Belajar dari sini maka posisi Badan Ekonomi Kreatif sangat penting yang dapat mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dikalangan masyarakat. Pekan promosi, pameran usaha UKM, pameran dagang, bazaar dan yang sejenisnya sangat dibutuhkan agar perekonomian terus bergerak. Pekan promosi, pameran UKM dsb juga harus dilakukan di daerah daerah dan

tidak di Jakarta saja. Apalagi ekonomi kreatif banyak dilakukan oleh usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah diharapkan dapat menjadi media agar perekonomian tetap bergerak.⁶

Dalam kondisi resesi dan depresi yang perlu dikawal adalah agar perekonomian tetap hidup. Pengusaha besar yang berprestasi dan memiliki branding ternama juga bisa membangkitkan kembali perekonomian dari depresi. Nampak aneh tapi perusahaan ini kuat modal dan kuat branding. Ia terus bertahan dalam kondisi ekonomi dilanda depresi hanya karena ingin mempertahankan branding perusahaan yang selama ini dikenal oleh masyarakat. Ia tidak mau nama besar perusahaannya tenggelam karena depresi. Kala depresi sudah menghancurkan banyak badan usaha ia masih hidup tanpa pesaing yang berarti. Dikala seperti inilah ia bangkit kembali dan secara perlahan mendorong perekonomian bergerak. Dapat dipahami bahwa perekonomian adalah fenomena sosial yang tidak pernah mati. Bahkan posisi fenomena ini semakin penting

⁶ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer,

PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 2. Baca juga buku yang ditulis oleh Boer Mauna hlm.2

dan menjadi semakin strategis pada masa mendatang.⁷

Generasi muda harus memahami ini dan mendalami seluk beluk kegiatan bisnis serta menjalaninya sejak awal. Arah negara boleh ditentukan oleh para politisi tapi kemakmuran dan kesejahteraan ditentukan oleh para pebisnis dan ekonom yang berjiwa bisnis. Opportunity pemuda dalam kegiatan bisnis sangat besar. Sebab itu pelajari entrepreneurship dan lakukan kegiatannya. Dengan demikian resesi dan depresi bukan hal yang perlu ditakuti sepanjang generasi muda berjiwa entrepreneur.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Resesi Ekonomi dan Implikasinya pada Hukum Nasional

Resesi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana perputaran ekonomi suatu negara berubah menjadi lambat atau buruk. Perputaran ekonomi yang melambat ini bisa berlangsung cukup lama bahkan tahunan akibat dari pertumbuhan produk domestik bruto

(PDB) suatu negara menurun selama dua kuartal dan berlangsung secara terus menerus.

PDB sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi suatu negara selama satu periode. Jadi, apabila suatu negara mengalami aktivitas ekonomi yang turun secara terus menerus selama dua periode, maka negara tersebut dapat dikatakan resesi.

Sedangkan National Bureau of Economic Research (NBER) yang terletak di Amerika Serikat, mengartikan resesi sebagai kondisi dimana negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan dilihat dari PDB riil, penghasilan, tingkat pengangguran, produksi industri, penjualan grosir-ritel.

Sebagaimana penjelasan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang dan

⁷ penanaman modal asing (Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional Hukum

Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta, hlm. 176.)

terjadinya hubungan dunia menjadi seolah-olah tanpa batas (*borderless*) yang menyebabkan perubahan secara signifikan terhadap kegiatan social, ekonomi, dan budaya (Susilatri, Tanjung, and Nugraheni 2015).

Selain itu, resesi ekonomi juga berpengaruh terhadap dinamika pembangunan yang dipicu oleh kemajuan pada trend global sangat berpengaruh terhadap tatanan hukum, sehingga harus dicermati secara kritis dan inovatif terhadap pembangunan hukum. Pada realitas hukum yang ada, seberapa efektifkah undang-undang ITE dan peraturan hukum nasional Indonesia lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis mampu menjadi benteng pertahanan atas perilaku aktifitas-aktifitas dalam dunia maya. Sebab aktifitas-aktifitas di dunia nyata sangat berbeda dengan aktifitas-aktifitas di dunia nyata, sehingga apakah hukum konvensional yang mengatur tata hubungan di dunia nyata dapat diterapkan untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dunia maya apalagi ketika melewati yuridiksi nasional (Alfana et al. 2017).

Dari berbagai sumber literasi terkait resesi ekonomi yang

memberikan peluang dan tantangan yang lebih berat, perkembangan ancaman sebagai kondisi bahaya di era modern saat ini menjadi tantangan khusus bagi negara-negara demokrasi di mana ancaman keadaan bahaya yang terjadi bersifat multikarakter baik ancaman yang bersifat militer maupun nonmiliter dan seringkali keduanya terjadi bersamaan untuk segera merumuskan solusi secara lebih pasti pada masa pandemi. Dalam sebuah kajian, Maryati menjelaskan bahwa perkembangan keadaan bahaya yang beragam harus direspon secara berbeda sesuai dengan sifatnya dengan model dan pelatihan tertentu (Maryati et al. 2021).

Sementara terkait resesi ekonomi menurut beberapa pemilik usaha, saat ini harga bahan baku semakin mahal, terjadi penurunan produksi atau sedikit, menyebabkan omzet menurun drastis dari biasanya. Untuk mengatasinya hal tersebut sekarang mereka memanfaatkan promosi penjualan dengan memberi diskon dan media online. Pemasaran melalui media sosial (*medsos*) kini dimanfaatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kinerja penjualan produknya, mulai dari media

Instagram, ecommerce, WhatsApp Business, dan berbagai platform lainnya.

Ada beragam faktor yang memicu terjadinya resesi pada suatu negara. Faktor-faktor penyebab terjadinya resesi adalah sebagai berikut.

1. Inflasi

Inflasi adalah kondisi naiknya harga secara terus menerus, baik itu harga barang maupun jasa. Adanya kenaikan harga ini berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat yang nantinya diikuti juga dengan penurunan produksi barang dan jasa.

Jika dibiarkan dalam waktu lama, hal ini akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masal, kemiskinan, dan terjadi resesi.

2. Deflasi Berlebihan

Seperti halnya inflasi, deflasi juga bisa membawa pengaruh yang buruk dan memicu terjadinya resesi. Deflasi adalah sebuah kondisi dimana harga barang dan jasa turun dari waktu ke waktu yang akhirnya berimbas pada upah yang dibayarkan mengalami penurunan. Deflasi juga ditandai dengan adanya penundaan pembelian

barang atau jasa sampai harga terendah. Hal ini tentunya sangat beresiko bagi pemilik usaha. Sebab, meskipun daya beli masyarakat kemungkinan akan naik, nyatanya pemilik usaha harus menekan biaya produksi yang berujung pada ruginya suatu bisnis. Jika masyarakat atau unit bisnis berhenti untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti membelanjakan uangnya, bukan tidak mungkin kondisi ekonomi yang ada akan rusak.

3. Gelembung Aset Pecah

Penyebab berikutnya resesi adalah pecahnya gelembung aset. Hal ini bisa terjadi saat investor mengambil langkah secara gegabah.

Misalnya, terjadi pembelian saham dan properti secara masif dengan anggapan harganya akan naik dengan cepat. Lalu, saat keadaan ekonomi tengah goyah, mereka akan beramai-ramai menjualnya yang mengakibatkan terjadinya panic selling dan berujung pada resesi akibat rusaknya pasar.

4. Guncangan Ekonomi yang Mendadak

Pemicu lain resesi adalah guncangan ekonomi secara mendadak. Hal ini ditandai dengan

menurunnya daya beli yang disebabkan kesulitan finansial serta masalah serius lainnya seperti tumpukan hutang.

Hutang yang menumpuk akan mempengaruhi membengkaknya bunga yang perlu dibayarkan dan berujung pada ketidakmampuan untuk melunasinya atau gagal bayar.

5. Perkembangan Teknologi

Resesi adalah kemerosotan ekonomi yang tidak hanya disebabkan dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Perkembangan teknologi turut menjadi faktor adanya resesi.

Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan lapangan pekerjaan yang banyak digantikan oleh teknologi terkemuka seperti Artificial Intelligence (AI) dan robot. Alhasil, lapangan pekerjaan akan menurun drastis dan membuat angka pengangguran meningkat.

6. Ketidakseimbangan Antara Produksi dan Konsumsi

Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi menjadi pemicu berikutnya. Barang dan jasa yang diproduksi secara berlebih dengan tingkat konsumsi atau daya beli yang menurun bisa membawa malapetaka bagi produsen. Hal ini mendorong terjadinya impor secara

besar-besaran, membengkaknya pengeluaran perusahaan, dan menipisnya laba perusahaan dalam negeri.

7. Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Penurunan Selama Dua Kuartal Berturut-Turut

Salah satu indikasi resesi adalah adanya penurunan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut yang dinilai dari melemahnya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

8. Nilai Impor Lebih Besar dari Ekspor

Indikasi lain terjadinya resesi adalah nilai impor suatu negara lebih besar ketimbang ekspor. Hal ini bisa memberikan efek terhadap defisitnya anggaran negara dan terjadinya penurunan pendapatan nasional.

9. Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingginya angka pengangguran suatu negara bisa mengindikasikan negara tersebut mengalami resesi. Sebab, tenaga kerja memiliki peran penting dalam perputaran perekonomian suatu negara.

Apabila angka pengangguran meningkat secara terus menerus, hal ini akan mengakibatkan terjadinya tingkat kriminalitas yang ikut naik.

Secara garis besar, resesi adalah

situasi yang muncul karena berbagai faktor. Misalnya krisis keuangan, salah mengambil keputusan perekonomian, adanya disrupsi rantai pasokan, disrupsi perdagangan eksternal, pecahnya gelembung ekonomi, sampai dengan faktor yang ada di luar kuasa manusia seperti bencana alam ataupun pandemi.

Dampak Adanya Resesi Ekonomi

Dampak resesi adalah akibat yang muncul dan mempengaruhi beberapa pihak antara membawa dampak pada pemerintahan, perusahaan, dan para pekerja.

1. Dampak Resesi Ekonomi Terhadap Pemerintahan

Resesi ekonomi membawa dampak yang cukup berat bagi pemerintah. Saat kondisi ini terjadi tentunya angka pengangguran akan meningkat dan pemerintah dituntut untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Alhasil, pinjaman pada bank asing kian meroket. Adanya resesi juga membuat pendapatan pajak dan non pajak menjadi rendah. Ini dikarenakan kondisi finansial masyarakat yang memburuk dan harga properti yang ikut turun. Sehingga, jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang masuk ke

kas negara menjadi lebih sedikit.

Di sisi lain, pemerintah juga terus didorong untuk melakukan pembangunan di sektor pemerintahan. Salah satunya yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya semua tuntutan yang ada serta menurunnya pemasukan pendapatan pajak, membuat negara mengalami defisit anggaran dan utang pemerintah menjadi lebih tinggi.

2. Dampak Resesi Ekonomi Terhadap Perusahaan

Resesi adalah kondisi perekonomian yang mampu membuat perusahaan jatuh bangkrut. Hal ini diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan dan mengancam arus kas.

Pada akhirnya, perusahaan akan memangkas biaya operasional dan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan, sampai dengan mengambil keputusan berat untuk melakukan efisiensi pegawai (PHK).

3. Dampak Resesi Ekonomi Terhadap Para Pekerja

Adanya dampak resesi adalah dampak yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan perusahaan, akan tetapi para pekerja turut terkena

imbasnya.

Area bisnis yang ditutup serta efisiensi pegawai yang dilakukan untuk menekan biaya operasional membuat banyak orang kehilangan pekerjaan akibat adanya PHK. Pekerja yang tidak terkena PHK pun ikut dirugikan dengan pemotongan upah yang didapat.

Hal ini menjadi pendorong adanya ketidakstabilan sosial, kesenjangan yang semakin menjamur dimana-mana, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Resesi ekonomi juga melahirkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dalam beberapa aspek karena dipengaruhi ekonomi dan kesehatan yang belum stabil. Sejak awal tahun tepatnya mulai Maret 2020 terjadi krisis kesehatan yang melanda dunia, yaitu menyebarnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya keseluruhan tatanan hidup masyarakat. Covid-19 tidak hanya merenggut jutaan nyawa manusia, melainkan juga telah menyebabkan puluhan juta manusia kehilangan pekerjaan dan penghasilan di seluruh dunia. Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor empat di dunia juga merasakan imbas dari pandemi Covid-19 secara

ekonomi. Fenomena ini mengakibatkan penegakan menjadi terkendala dan bersifat dinamis sehingga perlu terobosan hukum khusus terutama dalam penegakan hukum.

Resesi ekonomi tersebut tentunya akan menambah jumlah pengangguran dan pekerja yang dipecat atau di rumahkan, serta jumlah rakyat yang tak memiliki pendapatan. Dikarenakan dampak resesi ekonomi tersebut, pajak sebagai sektor pendapatan negara yang terbesar pastinya akan menerima dampak seperti berkurangnya orang yang membayar pajak atau bertambahnya jumlah terhutang pajak (Yulaikha 2018).

Lanskap perekonomian nasional perspektif hukum tersebut disebabkan bukan karena rakyat tidak mau membayar pajak, melainkan karena sebagian besar rakyat golongan menengah ke bawah tidak lagi mampu untuk membayar pajak dikarenakan berkurangnya penghasilan atau bahkan karena sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Untuk itu pemerintah selaku penyelenggara negara dan selaku pihak yang bertanggung jawab atas

kesejahteraan rakyat haruslah menciptakan solusi dengan mengutamakan hak-hak warganegara terkait dengan masalah tersebut, salah satunya dengan memberikan keringanan pajak kepada masyarakat. Indonesia negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, idealnya mengambil langkah penyelesaian masalah dengan melihat kaidahkaidah ajaran Islam khususnya terkait pemberian keringanan pajak kepada rakyat dengan tetap menyeimbangkan anggaran atau biaya penyelenggaraan Negara (Adiyanta 2020).

Resesi Ekonomi dan Implikasinya Perspektif Hukum Bisnis Membincang hukum bisnis dan ekonomi tidak bisa lepas dari persoalan dasar ilmu hukum sendiri. Jika diartikan dalam arti yang luas, bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidahkaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidahkaidah tersebut dalam kenyataan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa dimana ada

masyarakat, disana ada hukum. Dengan demikian suatu unsur pokok dalam hukum adalah bahwa hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, dimana manusia hidup dalam suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat (Rosana 2014).

Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat kompleks, dan unpredictable, substansi hukum ekonomi di Indonesia disamping harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, melakukan keberpihakan pada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan, juga harus mampu melakukan reflektivitas dengan langkah manageable, available, realistic, workable, and interwoven easily with all aspect of social life, kalau hal ini tidak dilakukan maka hukum bisnis semakin mengalami aliansi di masyarakat, seperti yang telah terjadi sekarang ini (Kustanto 2014).

Dalam kondisi ekonomi dan

perbisnisan demikian yang perlu dilakukan adalah penyusunnya adalah adanya penegakan etika bisnis yang konsisten. Hal ini penting karena penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia salah satunya disebabkan karena para konglomerat di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya tidak mengabdikan pada kepentingan nasional, tapi justru malah menjarah harta rakyat untuk dibawa keluar negeri. Itu semua disebabkan pada awalnya mereka dalam menjalankan bisnisnya tidak dilandasi etika bisnis yang kuat (Rumokoy 2010).

Dalam konteks penegakan hukum masa resesi ekonomi saat ini, Indonesia, khususnya di lingkungan pelaku ekonomi, keberadaan etika bisnis tampaknya masih merupakan suatu konsep. Naskah Kode Etik Pengusaha Indonesia sejak tahun 1989 telah disetujui oleh rapat Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk disosialisasikan dan ditegakkan di lingkungan pengusaha. Namun dalam praksis, masyarakat dengan mata telanjang telah melihat kekotoran sepak terjang pengusaha-pengusaha Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

III. KESIMPULAN

Dari kajian tentang resesi ekonomi dan implikasinya dalam perspektif hukum bisnis dapat disimpulkan bahwa dari sekian solusi yang ditawarkan sebagai solusi akibat resesi ekonomi masa pandemi, pendekatan hukum bisnis lebih memberikan kejelasan arah secara lebih pasti ketimbang lainnya. Secara hukum bisnis, hukum mampu memberikan gambaran solusi secara lebih pasti dalam menyelesaikan menanggulangi masalah resesi ekonomi yang terjadi melalui dua langkah bertahap. Pertama, langkah dan tahapan hukum bisnis secara prosedural (prosedural capability). Kedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi sekaligus berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status).

Seharusnya untuk lebih meningkatnya kualitas bisnis

di dunia maka rakyatnya pun harus lebih giat dan bersungguh sungguh dalam berbisnis tersebut supaya daya saing bisnis lebih berkembang.

Sekian atas penulisan jurnal saya semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk kalangan pembaca juga, apabila ada kritikan maupun saran yang membangun itu sangat di harapkan oleh penulis agar kedepannya penulisan jurnal ini lebih berkembang lagi, dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Agus. 2020. "Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12(1): 31–48.
- Aer, Revo Kristiadi. 2021. "Pengaruh Perang Dagang China-Amerika Serikat Terhadap Hubungan Dagang Indonesia Dengan Amerika Serikat." *Jurnal Politico* 10 (4).
- Alfana, Muhammad Arif Fahrudin, Desta Fauzan Arif, Warastri Laksmiasri, and Ayu Rahmaningtias. 2017. "Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender Di Indonesia."
- Bangsawan, Moh Indra. 2017. "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)." *Law and Justice* 2(1): 24–34.
- Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2(2): 83–92.
- Hairunnisa, Hairunnisa. 2020. "Peranan Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Alternatif Resesi Ekonomi Global 2020." *Jurnal Al Iqtishad* 2(01).
- <https://www.bbc.com/indonesia/dun>

ia-53168814.NoTitle.
“[https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-](https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-resesi-ini-bedanya-dengan-krisis-dan-depresi-ekonomi?page=all)

resesi-ini- bedanya-dengan-
krisisdan-depresi-
ekonomi?page=all.

Idayanti, Soesi, Suci Hartati, and
Toni Haryadi. 2019.
“Pembangunan Hukum
Bisnis Dalam Perspektif
Pancasila Pada Era
Revolusi Industri 4.0.”
Jurnal Jurisprudence 9(1):
90– 101.